

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Suriyaman Mustari Pide, 2015, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta : Kencana
- Achmad Edi Subiyanto dan Anna Triningsih, 2021, *Praktik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Depok : PT RajaGrafindo Persada.
- Aprilianti dan Kasmawati, 2022, *Hukum Adat Di Indonesia*, Bandarlampung: Pusaka Media.
- Bambang Eko Supriyadi, 2014, *Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Boedi Harsono, 2019, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Medan: CV. Nuansa Aulia
- Djoko Imbawani, 2013, *Hukum Perdata*, Bandung: Citapustaka
- Farkhani, et.al, *Filsafat Hukum Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme*, Solo: Kafilah Pubishing
- Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung: PT. Alumni.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Komstitusi RI.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang Undang*, Jakarta : Konstitusi Press.
- Julius Sembiring, 2018, *Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat*, Yogyakarta: STPN Press.
- Kansil CST, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kurnia Warman, 2023, *Peluang Hukum Pemulihan Tanah Ulayat Nagari Di Sumatera Barat*, Padang: Andalas University Press.
- Lilik Mulyadi, 2017, *Eksistensi Dinamika Dan Pelindungan Hukum Terhadap Hak Atas Ulayat Masyarakat Adat Di Indonesia*, Bandung: P.T Alumni.

Maria W. Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta:Kompas/

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta Pustaka Pelajar.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Rustan Darwis dkk, 2022, *Hukum Perdata*, Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Serlika Aprita dan Rio Adhitya, 2020, *Filsafat Hukum*, Depok: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto, 2010, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers

Urip Santoso, 2010, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta:Kencana Prenadamedia.

Jurnal

Adeline Dyah Kasetyaning Putri & Yohanes Suwanto, Kewenangan Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional Volume 1, Nomor 4, Year 2022*.

Dominikus Rato, Fendy Setyawan dan Koko Roby Yahya, Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Persepsi Filsafat Hukum, *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume.1, No.1 Februari 2023*.

Elizabeth Arden Madonna, Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia, *Bina Hukum Lingkungan Volume 3, Nomor 2, April 2019*.

Gisa Inggit Maulidia *et.al*, Hukum Dan Perubahan Masyarakat: Pendekatan Filsafat Roscoe Pound, Praxis: *Jurnal Filsafat Terapan, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2022*.

Maiyestati & Zarfinal, Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Eksistensi Dan Pengaturannya Di Sumatera Barat, *Jurnal HAM dan Ilmu Hukum (Jurisprudencia)*, Volume 6 Nomor 2, Desember 2023.

Nadira Apricia, hak negara dan masyarakat hukum adat atas Hutan adat, *Sibatik Jurnal, Volume 1 Nomor 7 tahun 2022*

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan